

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN  
KETAHANAN PANGAN KELUARGA DAN MENGURANGI STUNTING DI  
NAGARI KOTO VIII PELANGAI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**Gabriella Afriza Ayu<sup>1(a)</sup>, Rahmadani Yusran<sup>2(b)</sup>**

<sup>1,2</sup>Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang  
<sup>a)</sup>gebriellaafrizayu@gmail.com, <sup>b)</sup>yusranrdy@fis.unp.ac.id

**INFORMASI  
ARTIKEL**

**Article History:**

Dikirim:

12-02-2025

Diterbitkan Online:

01-03-2025

**Kata Kunci:**

Pemberdayaan Masyarakat,  
Ketahanan Pangan Keluarga,  
Stunting

**Keywords:**

Community Empowerment,  
Family Food Security,  
Stunting

**Corresponding Author:**

yusranrdy@fis.unp.ac.id

**ABSTRAK**

Penelitian ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat di Nagari Koto VIII Pelangai, Kabupaten Pesisir Selatan, dalam meningkatkan ketahanan pangan keluarga sebagai upaya pencegahan stunting. Memakai pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan dengan wawancara serta dokumentasi. Analisis data dilaksanakan dengan reduksi, penyajian, serta penarikan kesimpulan. Studi ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang menekankan intervensi berbasis masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam ketahanan pangan keluarga belum sepenuhnya berhasil mencapai tujuan kebijakan. Hambatan utama yang ditemukan adalah keterbatasan tenaga ahli, kecenderungan masyarakat memilih solusi instan, minimnya dukungan anggaran, serta rendahnya kesadaran dalam merawat bibit pangan. Meskipun demikian, pemberdayaan masyarakat tetap menjadi strategi penting dalam meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi stunting. Diperlukan peningkatan pelatihan teknis, penguatan dukungan anggaran, serta pembangunan kesadaran masyarakat agar lebih aktif dalam program ini.

**ABSTRACT**

This research focuses on community empowerment in Nagari Koto VIII Pelangai, Pesisir Selatan Regency, in improving family food security to prevent stunting. Data was collected using interviews and documentation, using a descriptive qualitative approach. Data analysis was carried out using reduction, presentation, and conclusion drawing. This study refers to Presidential Regulation Number 72 of 2021 concerning the Acceleration of Stunting Reduction, which emphasizes community-based interventions. The results show that community empowerment in family food security has not achieved policy objectives. The main obstacles found are limited experts, the tendency of people to choose instant solutions, lack of budget support, and low awareness in caring for food seedlings. Nevertheless, community empowerment remains an important strategy for improving food security and reducing stunting. There is a need to increase technical training, strengthen budget support, and build community awareness to be more active in this program.

**DOI:**

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v7i1.1185>

## PENDAHULUAN

Ketahanan pangan keluarga merupakan aspek krusial dalam pembangunan nasional karena berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat. Salah satu tantangan utama pemerintah daerah di Indonesia adalah mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan ketahanan pangan serta menekan angka stunting, mengingat ketahanan pangan mempengaruhi status gizi keluarga (Medina dkk., 2020). Rumah tangga dengan akses pangan yang stabil lebih siap dalam menopang pertumbuhan ekonomi (Beisembina, 2023). Pemberdayaan masyarakat dalam ketahanan pangan mencakup peningkatan pengetahuan, keterampilan, serta akses terhadap sumber daya yang berkelanjutan (Suyanto dkk., 2024). Pendekatan ini memperkuat otoritas masyarakat dalam mengelola pangan secara mandiri serta meningkatkan komitmen terhadap keberlanjutan program (Shobachiyah & Choiriyah, 2024; Dulkadir dkk., 2024).

Keterbatasan akses terhadap pangan bergizi menjadi faktor utama penyebab stunting, terutama di kalangan keluarga miskin (Mallikarjun & Bharadi, 2024). Anak-anak yang mengalami kekurangan gizi tidak hanya mengalami gangguan pertumbuhan fisik tetapi juga kognitif jangka panjang (Santoso & Pujianto, 2024; Nabilah dkk., 2024). Selain itu, kerawanan pangan berdampak pada kesehatan mental serta meningkatkan risiko penyakit kronis, memperburuk kualitas hidup masyarakat (Sharda & Sharma, 2024).

Di Indonesia, diversifikasi pangan masih menjadi tantangan utama, sebagaimana tercermin dalam Indeks Ketahanan Pangan Global (GFSI) 2021. Pemerintah telah menerapkan berbagai strategi, termasuk pemberdayaan masyarakat yang ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Intervensi sensitif melalui pemberdayaan masyarakat menjadi solusi untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga dan menekan angka stunting.

Kabupaten Pesisir Selatan menghadapi tantangan serupa. Meskipun terdapat regulasi seperti Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan, implementasi pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya efektif. Beberapa hambatan yang diidentifikasi meliputi kurangnya kesadaran masyarakat

dalam pemanfaatan bibit pangan, minimnya keterampilan dalam pengelolaan ternak dan tanaman, serta keterbatasan anggaran pemerintah. Ariyanti dkk. (2022) dalam "Dinamika Pelaksanaan Kebijakan Keamanan Pangan Lokal dalam Pencegahan Stunting" mengungkap bahwa keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program ketahanan pangan lokal.

Penelitian ini memiliki perbedaan mendasar dibandingkan penelitian sebelumnya. Jika studi sebelumnya berfokus pada ketahanan pangan lokal, maka penelitian ini lebih menitikberatkan pada strategi pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ketahanan pangan keluarga sekaligus sebagai langkah preventif terhadap stunting. Nagari Koto VIII Pelangai di Kabupaten Pesisir Selatan dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki prevalensi stunting yang tinggi (30,9% pada 2021), lebih tinggi dibanding rata-rata provinsi Sumatera Barat (27,5%). Meskipun berbagai intervensi telah dilakukan, angka stunting tetap tinggi dan belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengeksplorasi lebih jauh efektivitas pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ketahanan pangan keluarga serta menekan angka stunting secara lebih terukur dan berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif melalui metode deskriptif. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ketahanan pangan keluarga sebagai upaya pencegahan stunting di Nagari Koto VIII Pelangai, Kabupaten Pesisir Selatan. Lokasi penelitian dilaksanakan di Nagari Koto VIII Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan. Dokumentasi dan wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Untuk memilih informan, peneliti menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah informan sebanyak 15 orang. Metode ini dipilih karena mempertimbangkan informan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, bukan secara acak. Informan yang dipilih ialah yang memiliki keahlian dan pengetahuan luas dalam disiplin ilmu terkait, seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas

Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan, Pemerintah Nagari Koto VIII Pelangai, Forum Posyandu dan PKK, serta Keluarga penerima program ketahanan pangan keluarga. Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, peneliti melakukan pemilahan dan penyederhanaan informasi yang diperoleh untuk memastikan hanya data yang relevan yang digunakan. Penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi yang telah direduksi dalam bentuk naratif. Terakhir, pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti menyusun kesimpulan berdasarkan hasil penyajian data yang telah dikategorikan. Periode pengumpulan data berlangsung dari 16 Oktober sampai dengan 23 Oktober 2024, dengan wawancara dan dokumentasi dilakukan secara langsung di lapangan. Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu dengan membandingkan data dari berbagai informan yang memiliki perspektif yang berbeda namun relevan dengan topik penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan temuan penelitian, implementasi pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ketahanan pangan keluarga sebagai upaya pencegahan stunting di Nagari Koto VIII Pelangai dilaksanakan melalui berbagai intervensi yang komprehensif. Pemerintah daerah, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perikanan dan Pangan, serta Dinas Pertanian dan Perkebunan, telah melakukan identifikasi dan pemetaan masalah terkait ketahanan pangan keluarga dan stunting. Selanjutnya, pemerintah daerah merancang dan menjalankan program-program pemberdayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Namun demikian, implementasinya menghadapi beberapa permasalahan.

Pertama, keterbatasan tenaga ahli dalam memberikan keterampilan yang memadai untuk mendukung ketahanan pangan merupakan salah satu kendala dalam implementasi program pemberdayaan. Hal ini dapat terlihat dari pernyataan Rumi selaku Sekretaris Nagari koto VIII Pelangai yang mengatakan:

*“ . . .Selain itu, keterbatasan tenaga ahli di nagari, khususnya dalam bidang pemberian keterampilan teknis dan pendampingan, juga menjadi kendala utama. Ketiadaan*

*tenaga ahli ini membuat masyarakat kurang mendapatkan pelatihan yang memadai untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya pangan secara mandiri.”* (Wawancara, 22 Oktober 2024).

Minimnya jumlah penyuluh pertanian dan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi terkait isu ketahanan pangan dan stunting di wilayah ini menjadi salah satu faktor penghambat. Di Nagari Koto VIII Pelangai, sebagian besar masyarakat terlibat dalam pekerjaan di sektor pertanian (730 orang petani), namun sangat sedikit jumlah tenaga ahli yang dapat memberikan pelatihan tentang teknik perawatan bibit dan pemupukan, pengolahan dan pengemasan hasil pertanian, peternakan, serta perikanan. Keterbatasan tenaga ahli dan sumber daya manusia yang mumpuni di Nagari Koto VIII Pelangai menjadi hambatan utama dalam keberhasilan program ketahanan pangan dan pencegahan stunting. Sebab itu, dibutuhkan usaha untuk menambah ketersediaan tenaga ahli yang kompeten di bidang-bidang tersebut agar dapat memberikan keterampilan yang dibutuhkan masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan. Adapun data sosial ekonomi masyarakat Nagari Koto VIII Pelangai sebagai berikut:

**Tabel 1. Data Masyarakat Nagari Koto VIII Pelangai Berdasarkan Jenis Pekerjaan**

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	730
2.	Nelayan	6
3.	Buruh tani/ nelayan	81
4.	PNS	136
5.	Pegawai swasta	104
6.	Wiraswasta/pedagang	82
7.	TNI	4
8.	POLRI	2
9.	Lainnya	214
<b>Jumlah</b>		<b>1359</b>

*Sumber: IDM Nagari Koto VIII Pelangai, 2024*

Kedua, Pemberdayaan masyarakat terkendala oleh sulit melakukan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai tujuan suatu program. Kebiasaan masyarakat yang cenderung lebih menyukai proses instan dibandingkan dengan upaya yang membutuhkan waktu dan konsistensi merupakan permasalahan tersendiri. Pola pikir

ini dipengaruhi oleh kebiasaan sehari-hari yang mengutamakan solusi cepat tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. Misalnya, dalam pemenuhan kebutuhan pangan, masyarakat lebih memilih makanan instan atau olahan yang lebih praktis dan hemat waktu, meskipun nilai gizinya rendah, dibandingkan dengan membudidayakan tanaman pangan sendiri. Kebiasaan ini diperparah oleh minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pangan bergizi untuk mencegah stunting, serta rendahnya kesadaran akan proses yang berkelanjutan dalam meningkatkan ketahanan pangan keluarga. Keterbatasan pengetahuan dan kesadaran ini membuat masyarakat kurang tertarik pada program-program pangan yang memerlukan proses bertahap, karena mereka lebih menginginkan hasil yang cepat dan instan. Sebagaimana yang dinyatakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan, Salman mengatakan:

*“ . . . Kecenderungan masyarakat yang lebih memilih solusi instan, seperti membeli bahan pangan dari pada mengelola dan memproduksi sendiri. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan yang sudah terbentuk sehingga sulit untuk mengubah pola pikir masyarakat mengenai pentingnya produksi pangan mandiri untuk jangka panjang. Kedua, dalam merubah pola pikir dan kebiasaan masyarakat terkait konsumsi dan pemanfaatan bahan pangan yang tersedia. Misalnya, upaya pemberian bibit atau bantuan dari nagari tidak selalu berdampak, karena masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkannya secara optimal. Ketiga, tingkat pendidikan masyarakat juga mempengaruhi.”* (Wawancara, 16 Oktober 2024)

Oleh karena itu, upaya perubahan perilaku masyarakat menjadi tantangan tersendiri dalam mencapai tujuan peningkatan ketahanan pangan keluarga dan pencegahan stunting. Tidak hanya itu, perilaku masyarakat yang cenderung memilih proses instan membuat mereka enggan mengikuti penyuluhan dan pendampingan, karena mereka beranggapan bahwa proses tersebut memakan waktu yang lama dan tidak memberikan hasil yang cepat. Kecenderungan ini sering kali disebabkan oleh pola pikir yang mengutamakan kenyamanan sementara atau jangka pendek, di mana solusi cepat dianggap

lebih efisien meskipun tidak berkelanjutan. Akibatnya, mereka lebih memilih alternatif yang memberikan hasil instan meskipun tidak selalu mengutamakan kualitas pangan. Fenomena inilah yang menyebabkan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program-program peningkatan ketahanan pangan keluarga dan pencegahan stunting sulit tercapai. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 1 Tahun 2019 Tentang Ketahanan Pangan yang menegaskan penyelenggaraan ketahanan pangan Kabupaten Pesisir Selatan dimaksudkan untuk memperluas pengetahuan serta kepedulian masyarakat terhadap konsumsi pangan yang sehat, berkualitas, dan aman.

Ketiga, Implementasi pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ketahanan pangan keluarga sebagai upaya pencegahan stunting dilakukan melalui dua bentuk utama, yaitu distribusi bibit dan benih pangan serta kegiatan sosialisasi atau penyuluhan ketahanan pangan. Distribusi bibit dan benih pangan melibatkan kader posyandu dalam proses penyalurannya. Dalam program ini, pemerintah nagari telah mengalokasikan 20% dari dana desa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan. Sebagaimana yang dinyatakan Sekretaris Nagari Koto VIII Pelangai, Rumi mengatakan:

*“ . . . kegiatan pemberdayaan yg dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga di nagari ini salah satunya adalah pemberian bibit dan benih pangan kepada masyarakat baik bibit hewani maupun nabati. Pemerintah nagari merancang dan melaksanakan program-program yang langsung merujuk pada kebutuhan pangan masyarakat. Setiap tahunnya, dana sebesar 20% dari anggaran nagari dialokasikan khusus untuk program ketahanan pangan. Dana ini mendukung berbagai kegiatan, mulai dari penyediaan pangan nabati, dan hewani.”* (Wawancara, 22 Oktober 2024)

Sebagian besar masyarakat di Nagari Koto VIII Pelangai bekerja di sektor pertanian (730 petani), yang menunjukkan potensi besar untuk memanfaatkan bibit dan benih pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan. Program ini bertujuan untuk tidak hanya meningkatkan ketahanan pangan keluarga, tetapi juga meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan hasil pangan yang ditanam. Hal ini sangat penting mengingat sebagian besar

masyarakat juga bekerja sebagai buruh tani (81 orang) dan wiraswasta/pedagang (82 orang), yang memiliki ketergantungan pada hasil pertanian dan produksi pangan untuk menopang ekonomi keluarga. Program distribusi bibit diharapkan dapat membantu meningkatkan ekonomi dan mendukung pencegahan stunting, karena anak-anak yang mengalami gizi buruk sering kali berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Sebagaimana yang dinyatakan Rumi:

*“ . . . pemberdayaan yang dilakukan salah satunya pemberian bibit dan benih pangan kepada masyarakat. Tujuan diberikannya bibit ini untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga, kemudian tujuannya selain dari pencegahan stunting juga untuk meningkatkan ekonomi masyarakat karena anak-anak yang mengalami gizi buruk ini berasal dari keluarga yang kurang mampu atau keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Masyarakat yang ekonominya terbatas otomatis susah untuk mendapatkan gizi yang seimbang, itu sebabnya pemberian bibit dan benih pangan ini dilakukan dengan harapan mampu mencegah stunting pada balita dan juga bisa meningkatkan ekonomi bagi masyarakat.”* (Wawancara, 22 Oktober 2024)

Selain itu, pemerintah nagari bekerja sama dengan kader posyandu guna mengedukasi, membimbing, dan mensosialisasikan kepada masyarakat terkait esensi konsumsi makanan bergizi dan penerapan pola makan sehat. Melalui program distribusi bibit dan benih pangan serta kegiatan edukasi dan penyuluhan, pemerintah nagari berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga dan mencegah masalah stunting di masyarakat. Pemerintah nagari berkomitmen untuk melaksanakan program ini secara berkelanjutan dengan mengalokasikan dana desa yang memadai. Kolaborasi dengan kader posyandu juga menjadi kunci dalam menjangkau masyarakat dan memberikan informasi serta pendampingan terkait pentingnya bergizi serta bernutrisi optimal guna menghindari stunting pada anak. Dengan pendekatan komprehensif ini, diharapkan program pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ketahanan pangan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Namun, dalam pelaksanaannya, implementasi pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ketahanan pangan keluarga

sebagai upaya pencegahan *stunting* di Nagari Koto VIII Pelangai belum berhasil mencapai tujuannya. Program ketahanan pangan keluarga ini berupa pemberian atau distribusi bibit dan benih pangan, serta sosialisasi atau penyuluhan pangan, untuk mendukung ketahanan pangan keluarga dan pencegahan *stunting* di Nagari Koto VIII Pelangai. Beberapa masalah yang dihadapi antara lain distribusi bibit yang tidak merata, pembagian bantuan berdasarkan status gizi anak, serta kualitas bibit yang rendah, baik untuk bibit hewani maupun nabati, yang menyebabkan banyak bibit tidak dapat tumbuh atau bertahan hidup. Selain itu, keterbatasan alat penunjang seperti pakan atau pupuk dan kendala ekonomi masyarakat yang kesulitan membeli alat tambahan turut menghambat keberlanjutan program ini. Tidak adanya pelatihan atau pendampingan dalam merawat bibit dan benih juga menjadi hambatan, karena terbatasnya Sumber Daya Manusia di tingkat nagari. Hal ini menghambat tercapainya tujuan program untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mencegah *stunting* secara efektif. Diperlukan upaya yang lebih komprehensif dari pemerintah nagari dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat ini.

Mengacu pada pendapat Suharto dalam (Sumolang dkk., 2018) yang mengatakan bahwa Pemberdayaan masyarakat dapat dimaknai sebagai sebuah proses serangkaian kegiatan untuk memperkuat kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Dan sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti kepercayaan diri, menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas kehidupannya (Mustanir dkk., 2023). Kemudian, mengacu pada pendapat Mazmanian dan Sabatier dalam (Wahab, 2014) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, baik dalam bentuk undang-undang, perintah atau keputusan Eksekutif dan badan peradilan. Hal ini menunjukkan tidak relevan dengan implementasi pemberdayaan

masyarakat dalam meningkatkan ketahanan pangan keluarga sebagai upaya pencegahan *stunting* yang hanya didasarkan pada keputusan kebijakan dasar saja.

Dalam upaya melaksanakan dan meningkatkan ketahanan pangan, Kabupaten Pesisir Selatan memiliki kebijakan yaitu adanya Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Ketahanan Pangan, yang mana kebijakan ini mengatur upaya mewujudkan ketahanan pangan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu dan bergizi bagi masyarakat. Yang menjadi salah satu langkah sebagai penerapan pangan dan perbaikan gizi, salah satu program yang dilakukan yaitu memberikan bantuan/distribusi pangan kepada masyarakat yang memiliki anak *stunting* agar dapat terlaksana nya kemandirian pangan dan dapat berdampak bagi status kesahatan anak. Namun, dalam pelaksanaannya masih belum relevan dimana distribusi bibit dan benih pangan yang disalurkan kurang tepat sasaran dengan masih adanya ketimpangan pembagian bantuan berdasarkan status gizi anak.

Meskipun definisi pemberdayaan masyarakat menurut Suharto menekankan pada pemberdayaan kelompok lemah dan upaya mencapai masyarakat yang berdaya, pendapat Mazmanian dan Sabatier tentang implementasi kebijakan tidak seluruhnya tidak relevan dengan upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ketahanan pangan keluarga sebagai pencegahan *stunting*. Implementasi kebijakan tidak hanya dimaknai sebagai pelaksanaan keputusan dasar berupa undang-undang atau keputusan pemerintah, tetapi juga mencakup proses lebih luas dalam mengoperasionalkan kebijakan melalui program, prosedur, dan mekanisme yang sesuai dengan tujuan kebijakan.

Dalam konteks meningkatkan ketahanan pangan keluarga untuk mencegah *stunting* di Nagari Koto VIII Pelangai, meskipun terdapat Perda Ketahanan Pangan yang menjadi dasar kebijakan, implementasinya tidak cukup hanya berhenti pada distribusi bantuan pangan. Diperlukan upaya pemberdayaan masyarakat yang lebih komprehensif, meliputi penyediaan sarana produksi, pelatihan, pendampingan, serta sosialisasi dan edukasi yang efektif. Hanya dengan pendekatan yang lebih menyeluruh, kebijakan ketahanan pangan dapat diimplementasikan secara tepat sasaran dan

berkelanjutan, sehingga mampu mencapai tujuan peningkatan ketahanan pangan keluarga dan pencegahan *stunting*.

## PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Nagari Koto VIII Pelangai, Kabupaten Pesisir Selatan, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ketahanan pangan keluarga sebagai upaya pencegahan *stunting* masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi efektivitas program ketahanan pangan keluarga antara lain keterbatasan tenaga ahli, perubahan perilaku masyarakat yang sulit dilakukan, serta kurangnya fasilitas pendukung seperti pelatihan dan pendampingan yang memadai. Secara teoretis, hasil penelitian ini memperkuat pentingnya pendekatan komprehensif dalam pemberdayaan masyarakat untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan. Konsep pemberdayaan tidak hanya berhenti pada distribusi bantuan pangan saja, tetapi harus mencakup keberlanjutannya seperti pelatihan, penyediaan sarana produksi, serta pendampingan yang kontinu untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengelola pangan. Secara praktis, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan pemberdayaan masyarakat membutuhkan kolaborasi yang lebih intensif antar pemangku kepentingan, peningkatan kapasitas SDM, serta upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ketahanan pangan dan pengelolaan pangan yang bergizi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis dapat memberikan saran seperti Penambahan jumlah tenaga ahli di tingkat nagari untuk memberikan pelatihan dan pendampingan yang lebih intensif bagi masyarakat terkait pengelolaan sumber daya pangan, kemudian agar dapat meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya ketahanan pangan yang berkelanjutan, serta mengubah pola pikir masyarakat yang lebih memilih solusi instan dan Memperbaiki distribusi bibit dan benih pangan agar lebih tepat sasaran, serta memastikan kualitas bibit yang diberikan memenuhi standar agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Dalam penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu terbatasnya jumlah sampel yang digunakan, sehingga tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi yang

lebih luas di seluruh Kabupaten Pesisir Selatan. Selain itu, penelitian ini hanya fokus pada satu nagari, yang mungkin memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang berbeda dengan nagari lainnya. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut dengan sampel yang lebih besar dan cakupan yang lebih luas diperlukan untuk menghasilkan generalisasi yang lebih akurat terkait implementasi pemberdayaan masyarakat dalam ketahanan pangan keluarga dan pencegahan stunting.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anand Mallikarjun & H H Bharadi. (2024). Child Malnutrition In India: An Analysis Of Stunting Children's. *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)*, 571–575. <https://doi.org/10.36713/epra18398>
- Ardiani, F. D., & Rusmala Dibyorini, M. C. (2021). Pemberdayaan Perempuan Melalui Kelompok Wanita Tani (KWT) "ASRI" Kelurahan Bendung Kapanewon Semin Kabupaten Gunung Kidul. *SOSIO PROGRESIF: Media Pemikiran Studi Pembangunan Sosial*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.47431/sosioprogresif.v1i1.111>
- Dulkadir, D., Martono, E., & Subejo, S. (2024). Realizing regional food security by empowering the communities through the food independent village program. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(10), 7714. <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i10.7714>
- Medina, J. A. N., Pérez, A. M. M., Rodríguez, L. E. M., Toro, A. K. O., & Díaz, N. (2020). Household food security, anthropometric assessment of nutritional status and socioeconomic status of families in an urban community. *TAYACAJA*, 3(2).
- Nabilah, K., Muhdar, I. N., Lestari, W. A., & Sariman, S. (2024). The Relationship Between Macro-Nutrient Intake, Food Security, and Nutrition-Related Knowledge with The Incidence of Stunting in Toddlers. *Journal of Health and Nutrition Research*, 3(2), 164–171. <https://doi.org/10.56303/jhnresearch.v3i2.268>
- Nelsi, M., Akbar, I. R., & Kristianti, L. S. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Guna Mencapai Desa Mandiri Sejahtera Di Desa Rancasumur, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang-Banten. *Abdi Jurnal Publikasi*, 2(6), 255–263.
- Rinto Z.W Abidjulu, S. R. P. (2023). *Membangun Ketahanan Pangan Untuk Pencegahan Stunting Di Desa Tananagaya Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara Sulawesi Tengah*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8184013>
- Santoso, P., & Pujiyanto, T. (2024). The Analysis of Factors that Influence Stunting. *Jurnal Ners dan Kebidanan (Journal of Ners and Midwifery)*, 11(2), 200–208. <https://doi.org/10.26699/jnk.v11i2.ART.p200-208>
- Shobachiyah, I., & Choiriyah, I. U. (2024). Empowerment of Community Groups to Realize Food Security. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 15(3). <https://doi.org/10.21070/ijccd.v15i3.1112>
- Suyanto, Rahmawati Erma Standsyah, & Dendy Syahru Ramadhan. (2024). Community Economic Empowerment for the Creation of Self-Sufficient Villages. *Help: Journal of Community Service*, 1(2), 148–156. <https://doi.org/10.62569/hjcs.v1i2.63>
- Wahab, S. (2014). *Kebijakan Publik Alfabeta*.
- A. N. Beisembina. (2023). Conceptual Foundations Of Food Security Management In The Region. *Bulletin of Toraihyrov University. Economics series*, 3.2023, 6–18. <https://doi.org/10.48081/BQLR9800>